



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : Kep- 122 /K/SU/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN
MUTASI KEPEGAWAIAN LAINNYA SERTA PENETAPAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL
TERTEUTU BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian tugas-tugas di bidang kepegawaian sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, dipandang perlu mengatur kembali penunjukan pejabat yang berwenang untuk atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian lainnya serta penetapan angka kredit pejabat fungsional tertentu bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang penunjukan pejabat yang berwenang untuk atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian lainnya serta penetapan angka kredit pejabat fungsional tertentu bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

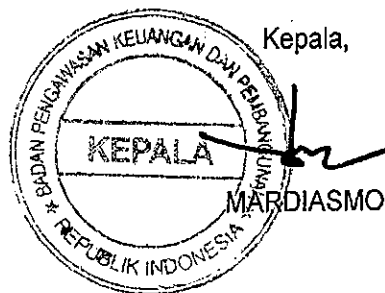
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-713/K/SU/2002 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan wewenang kepada para pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian lainnya serta penetapan angka kredit pejabat fungsional tertentu bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- KEDUA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka ketentuan yang bertentangan dengan wewenang penandatanganan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian lainnya serta penetapan angka kredit pejabat fungsional tertentu bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2011



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat dan Kepala Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh, Medan II, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta IV, Bogor, Bandung II, Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo, Denpasar, Kupang, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Makassar II, Manado, Palu, Kendari, Ambon, dan Jayapura.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKP

Nomor : Kep- 122 /K/SU/2011

Tanggal : 17 Februari 2011

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	KEWENANGAN MENANDATANGANI
1	Sekretaris Utama	Kenaikan Pangkat PNS	Nota usul persetujuan teknis BKN tentang kenaikan pangkat ke gol.IV/c s.d. IV/e di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan kenaikan pangkat ke gol.IV/a s.d. IV/b bagi pejabat struktural di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan kenaikan pangkat ke gol.IV/a s.d. IV/b (kecuali pejabat struktural) di lingkungan BPKP.
		Pemindahan/perbantuan PNS	Keputusan mutasi pemindahan PNS yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Utama di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Keputusan mutasi pemindahan PNS gol.III (kecuali pejabat struktural) di lingkungan BPKP.
			Keputusan mutasi pemindahan PNS gol.IV untuk diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi lain (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Keputusan mutasi pemindahan PNS gol.III untuk diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi lain (kecuali yang menduduki jabatan struktural).
			Nota usul persetujuan teknis perpindahan PNS antar instansi dan Keputusan pengangkatan sebagai tenaga pelimpahan dari instansi lain menjadi PNS di lingkungan BPKP bagi PNS gol.IV (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis perpindahan PNS antar instansi dan Keputusan pengangkatan sebagai tenaga pelimpahan dari instansi lain menjadi PNS di lingkungan BPKP bagi PNS gol.III.
		Pemberhentian/Pensiun PNS	Keputusan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat bukan karena Hukuman Disiplin sebagai PNS dengan hak pensiun/tanpa hak pensiun bagi PNS gol. IV/a s.d. gol.IV/b di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Keputusan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat bukan karena Hukuman Disiplin sebagai PNS dengan hak pensiun/tanpa hak pensiun bagi PNS gol. III di lingkungan BPKP.
			Keputusan pemberian uang tunggu dan pemberian bebas tugas (MPP) menjelang pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun bagi PNS gol. IV/a s.d. gol.IV/b di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Keputusan pemberian uang tunggu dan pemberian bebas tugas (MPP) menjelang pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun bagi PNS gol. III di lingkungan BPKP.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKP

Nomor : Kep- 122 /K/SU/2011

Tanggal : 17 Februari 2011

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	KEWENANGAN MENANDATANGANI
			Usul pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak - mendapat pensiun bagi PNS gol.IV/c s.d gol.IV/e di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Usul pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak mendapat pensiun bagi PNS gol.IV/a s.d gol.IV/b di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputan, Pusat-pusat dan Inspektorat di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Usul pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak - mendapat pensiun bagi PNS gol.III/a s.d gol.III/d di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputan, Pusat-pusat dan Inspektorat.
		Kenaikan Gaji Berkala / Penyesuaian Gaji Pokok PNS	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi pejabat struktural eselon I di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Kedeputan dan Inspektorat (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi pejabat struktural eselon II di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Kedeputan dan Inspektorat.
			Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok PNS bagi pejabat struktural eselon I dan eselon II di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Kedeputan dan Inspektorat.
		Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu	Persetujuan teknis pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional Auditor Madya dan Auditor Utama di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Persetujuan teknis pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana s.d Penyelia dan jenjang Pertama s.d. Muda di lingkungan BPKP.
			Nota usul persetujuan teknis BKN tentang pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Keputusan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional tertentu jenjang Madya bagi PNS di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Keputusan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional tertentu jenjang Muda bagi PNS di lingkungan BPKP.
		Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Auditor Madya gol.IV/b s.d. Auditor Utama gol.IV/e di lingkungan Sekretariat Utama, Pusat-pusat, Inspektorat dan perwakilan BPKP.
			Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Auditor Madya gol.IV/b s.d. Auditor Utama gol.IV/e di lingkungan Kedeputan (apabila Deputi berhalangan tetap).

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKP

Nomor : Kep- 122 /K/SU/2011

Tanggal : 17 Februari 2011

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	KEWENANGAN MENANDATANGANI
		Mutasi Kepegawaian lainnya	Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan peninjauan - masa kerja bagi PNS gol.IV/c s.d. IV/e di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan peninjauan - masa kerja bagi PNS gol.IV/a s.d. IV/b di lingkungan BPKP.
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan perubahan - nama/tanggal lahir bagi PNS gol.IV/c s.d. Gol.IV/e di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan perubahan - nama/tanggal lahir bagi PNS gol.IV/a s.d. Gol.IV/b di lingkungan BPKP .
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan cuti di luar - tanggungan negara bagi PNS gol.IV/c s.d. Gol.IV/e di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan cuti di luar - tanggungan negara bagi PNS gol.IV/a s.d. Gol.IV/b di lingkungan BPKP.
		Mutasi Jabatan Fungsional Umum	Keputusan pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS gol.IV di lingkungan BPKP.
2	Deputi Kepala BPKP	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Auditor Madya - gol.IV/b s.d. Auditor Utama gol.IV/e di lingkungannya.
3	Direktur	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Auditor Pelaksana - s.d. Auditor Madya gol.IV/a di lingkungannya.
			Penetapan Angka Kredit pengangkatan pertama PNS ke dalam - jabatan fungsional Auditor di lingkungannya.
4	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Pengangkatan CPNS	Nota usul persetujuan teknis BKN dan Keputusan penetapan NIP - CPNS.
		Pengangkatan PNS	Nota usul persetujuan teknis BKN dan Keputusan pengangkatan - PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun.
			- Keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
		Kenaikan Pangkat PNS	Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan kenaikan - pangkat ke gol.IV/a s.d. IV/b (kecuali pejabat struktural) di lingkungan BPKP (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan kenaikan - pangkat ke gol.IV/a s.d. IV/b bagi pejabat struktural di lingkungan BPKP (apabila Kepala BPKP dan Sekretaris Utama berhalangan tetap).

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKP

Nomor : Kep- 122 /K/SU/2011

Tanggal : 17 Februari 2011

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	KEWENANGAN MENANDATANGANI
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan kenaikan pangkat ke gol.III/a s.d. III/d di lingkungan BPKP.
		Pemindahan/Perbantuan PNS	Keputusan mutasi pemindahan PNS gol.III (kecuali pejabat struktural) di lingkungan BPKP (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Keputusan mutasi pemindahan PNS gol.I s.d. gol.II di lingkungan BPKP .
			Keputusan mutasi pemindahan PNS gol.III untuk diperbantukan/ dipekerjakan pada Instansi lain (kecuali yang menduduki jabatan struktural) apabila sekretaris Utama berhalangan tetap.
			Keputusan mutasi pemindahan PNS gol.I s.d. gol.II untuk diperbantukan/ dipekerjakan pada Instansi lain.
			Nota usul persetujuan teknis perpindahan PNS antar instansi dan Keputusan pengangkatan sebagai tenaga pelimpahan dari instansi lain menjadi PNS di lingkungan BPKP bagi PNS gol.III (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis perpindahan PNS antar instansi dan Keputusan pengangkatan sebagai tenaga pelimpahan dari instansi lain menjadi PNS di lingkungan BPKP bagi PNS gol.I s.d. Gol.II.
		Pemberhentian/Pensiun PNS	Keputusan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat bukan karena Hukuman Disiplin sebagai PNS dengan hak pensiun/tanpa hak pensiun bagi PNS gol. III di lingkungan BPKP (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Keputusan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat bukan karena Hukuman Disiplin sebagai PNS dengan hak pensiun/tanpa hak pensiun bagi PNS gol. III di lingkungan BPKP (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Keputusan pemberian uang tunggu dan pemberian bebas tugas (MPP) menjelang pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun bagi PNS gol. III di lingkungan BPKP (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Keputusan pemberian uang tunggu dan pemberian bebas tugas (MPP) menjelang pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun bagi PNS gol. I dan gol. II di lingkungan BPKP.
			Usul pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak mendapat pensiun bagi PNS gol.III/a s.d gol.III/d di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputian, Pusat-pusat dan Inspektorat (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKP

Nomor : Kep- 122 /K/SU/2011

Tanggal : 17 Februari 2011

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	KEWENANGAN MENANDATANGANI
			Usul pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak mendapat pensiun bagi PNS gol.I dan gol.II di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputan, Pusat-pusat dan Inspektorat di lingkungan BPKP.
			Usul pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak mendapat pensiun bagi PNS gol.I s.d. gol.IV/b di lingkungan Perwakilan BPKP (apabila Kepala Perwakilan BPKP berhalangan tetap).
		Kenaikan Gaji Berkala / Penyesuaian Gaji Pokok PNS	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi pejabat struktural eselon II di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Kedeputan dan Inspektorat (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS gol. III dan gol.IV di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Kedeputan dan Inspektorat (kecuali pejabat Struktural eselon I dan eselon II).
			Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS di lingkungan unit kerja Pusat-pusat (apabila Kepala Pusat berhalangan tetap).
			Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok PNS bagi pejabat struktural eselon I dan eselon II di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Kedeputan dan Inspektorat (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok PNS bagi PNS gol. III dan gol.IV di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Kedeputan dan Inspektorat (kecuali pejabat Struktural eselon I dan eselon II).
		Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu	Persetujuan teknis pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana s.d. Penyelia dan jenjang Pertama s.d. Muda di lingkungan BPKP (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Keputusan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional tertentu jenjang Muda bagi PNS di lingkungan BPKP (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Keputusan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana s.d. Pertama bagi PNS di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputan, Pusat-pusat dan Inspektorat.
		Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Auditor Pelaksana s.d. Auditor Madya gol.IV/a di lingkungan Sekretariat Utama.
			Penetapan Angka Kredit pengangkatan pertama PNS ke dalam jabatan fungsional Auditor di lingkungan Sekretariat Utama.
			Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Auditor Pelaksana s.d. Auditor Madya gol.IV/a di lingkungan Direktorat, Pusat-pusat dan Inspektorat (apabila Direktur dan Inspektur berhalangan tetap).

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKP

Nomor : Kep- 122 /K/SU/2011

Tanggal : 17 Februari 2011

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	KEWENANGAN MENANDATANGANI
			Penetapan Angka Kredit pengangkatan pertama PNS ke dalam jabatan fungsional Auditor di lingkungan Direktorat, Pusat-pusat dan Inspektorat (apabila Direktur dan Inspektur berhalangan tetap).
			Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Analis Kepegawaian Pelaksana s.d. Analis Kepegawaian Madya di lingkungan BPKP.
			Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Arsiparis Pelaksana s.d. Arsiparis Madya, Pranata Komputer Pelaksana s.d. Pranata Komputer Madya di lingkungan BPKP (apabila Kepala Biro Umum dan Kepala Pusat Informasi Pengawasan berhalangan tetap).
		Mutasi Kepegawaian lainnya	Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan peninjauan masa kerja bagi PNS gol.IV/a s.d. IV/b di lingkungan BPKP (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan peninjauan masa kerja bagi PNS gol.I s.d. Gol.III di lingkungan BPKP.
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan perubahan nama/tanggal lahir bagi PNS gol.IV/a s.d. Gol.IV/b di lingkungan BPKP (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan perubahan nama/tanggal lahir bagi PNS gol.I s.d. Gol.III di lingkungan BPKP .
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan cuti di luar tanggungan negara bagi PNS gol.IV/a s.d. Gol.IV/b di lingkungan BPKP (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan cuti di luar tanggungan negara bagi PNS gol.I s.d. Gol.III di lingkungan BPKP.
		Mutasi Jabatan Fungsional Umum	Keputusan pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS gol.IV di lingkungan BPKP (apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap)
			Keputusan pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS gol.III di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputan, Pusat-pusat dan Inspektorat.
			Rekomendasi/persetujuan pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Perwakilan BPKP.
5	Kepala Biro Umum	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Arsiparis Pelaksana s.d. Arsiparis Madya di lingkungan BPKP.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKP

Nomor : Kep- 122 /K/SU/2011

Tanggal : 17 Februari 2011

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	KEWENANGAN MENANDATANGANI
6	Inspektur	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Auditor Pelaksana s.d. Auditor Madya gol.IV/a di lingkungan Pusat-pusat dan Inspektorat.
			Penetapan Angka Kredit pengangkatan pertama PNS ke dalam jabatan fungsional Auditor di lingkungan Pusat-pusat dan Inspektorat.
7	Kepala Pusat Informasi Pengawasan	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Pranata Komputer Pelaksana s.d. Pranata Komputer Madya di lingkungan BPKP.
8	Kepala Pusat	Kenaikan Gaji Berkala / Penyesuaian Gaji Pokok PNS	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS di lingkungannya.
			Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok PNS bagi PNS gol. III dan gol.IV di lingkungannya.
9	Kepala Perwakilan BPKP	Kenaikan Pangkat PNS	Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan kenaikan pangkat ke gol.I/b s.d. II/d di lingkungannya.
		Pemberhentian dan Pensiun PNS	Usul pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak mendapat pensiun bagi PNS gol.I s.d. gol.IV/b di lingkungannya.
		Kenaikan Gaji Berkala / Penyesuaian Gaji Pokok PNS	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS di lingkungannya.
			Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok PNS bagi PNS gol. III dan gol.IV di lingkungannya.
		Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu	Keputusan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana s.d. Pertama bagi PNS di lingkungannya.
		Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Auditor Pelaksana s.d. Auditor Madya gol.IV/a di lingkungannya.
			Penetapan Angka Kredit pengangkatan pertama PNS ke dalam jabatan fungsional Auditor di lingkungannya.
		Mutasi Jabatan Fungsional Umum	Keputusan pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS s.d. gol.III di lingkungannya.
10	Kepala Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai	Pengangkatan CPNS	Nota usul persetujuan teknis BKN dan Keputusan penetapan NIP CPNS (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).
		Pengangkatan PNS	Nota usul persetujuan teknis BKN dan Keputusan pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).
			Keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKP

Nomor : Kep- 122 /K/SU/2011

Tanggal : 17 Februari 2011

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	KEWENANGAN MENANDATANGANI
		Kenaikan Pangkat PNS	Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan kenaikan pangkat ke gol.III/a s.d. III/d di lingkungan BPKP (apabila Kepala Biro Kepegawaian berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan kenaikan pangkat ke gol.I/b s.d. II/d di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputian, Pusat-pusat dan Inspektorat.
		Kenaikan Gaji Berkala / Penyesuaian Gaji Pokok PNS	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS gol. III dan gol.IV di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Kedeputian dan Inspektorat (kecuali pejabat Struktural eselon I dan eselon II) apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap.
			Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS gol. I dan gol.II di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Kedeputian dan Inspektorat.
			Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok PNS bagi PNS gol. III dan gol.IV di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Kedeputian dan Inspektorat (kecuali pejabat Struktural eselon I dan eselon II) apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap.
			Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok PNS bagi PNS gol. I dan gol.II di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Kedeputian dan Inspektorat .
		Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu	Keputusan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana s.d. Pertama bagi PNS di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputian, Pusat-pusat dan Inspektorat (apabila Kepala Biro Kepegawaian berhalangan tetap).
		Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Auditor Pelaksana s.d. Auditor Madya gol.IV/a di lingkungan Sekretariat Utama (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).
			Penetapan Angka Kredit pengangkatan pertama PNS ke dalam jabatan fungsional Auditor di lingkungan Sekretariat Utama (apabila Kepala Biro Kepegawaian berhalangan tetap).
			Penetapan Angka Kredit pengangkatan pertama PNS ke dalam jabatan fungsional Auditor di lingkungan Direktorat, Pusat-pusat dan Inspektorat (apabila Direktur dan Inspektur berhalangan tetap).
			Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Analis Kepegawaian Pelaksana s.d. Analis Kepegawaian Madya di lingkungan BPKP (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).
		Mutasi Kepegawaian lainnya	Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan peninjauan masa kerja bagi PNS gol.I s.d. Gol.III di lingkungan BPKP (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKP

Nomor : Kep- 122 /K/SU/2011

Tanggal : 17 Februari 2011

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	KEWENANGAN MENANDATANGANI
			Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan perubahan nama/tanggal lahir bagi PNS gol.I s.d. Gol.III di lingkungan BPKP (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).
		Mutasi Jabatan Fungsional Umum	Keputusan pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS gol.III di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputan, Pusat-pusat dan Inspektorat (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).
			Rekomendasi/persetujuan pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Perwakilan BPKP (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).
			Keputusan pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS gol.I dan gol.II di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputan, Pusat-pusat dan Inspektorat.
11	Kepala Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	Pemindahan/Perbantuan PNS	Keputusan mutasi pemindahan PNS gol.I s.d. gol.II di lingkungan - BPKP (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).
			Keputusan mutasi pemindahan PNS gol.I s.d. gol.II untuk - diperbantukan/ dipekerjakan pada Instansi lain (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).
			Nota usul persetujuan teknis perpindahan PNS antar instansi dan Keputusan pengangkatan sebagai tenaga pelimpahan dari - instansi lain menjadi PNS di lingkungan BPKP bagi PNS gol.I s.d. Gol.II (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).
		Pemberhentian dan Pensiun PNS	Keputusan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat bukan karena Hukuman Disiplin sebagai PNS dengan hak - pensiun/tanpa hak pensiun bagi PNS gol. I dan gol.II di lingkungan BPKP (apabila Kepala Biro Kepegawaian berhalangan tetap).
			Keputusan pemberian uang tunggu dan pemberian bebas tugas (MPP) menjelang pemberhentian dengan hormat sebagai PNS - dengan hak pensiun bagi PNS gol. I dan gol. II di lingkungan BPKP (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).
		Mutasi Kepegawaian lainnya	Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan cuti di luar tanggungan negara bagi PNS gol.I s.d. Gol.III di lingkungan BPKP (apabila Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berhalangan tetap).
12	Kepala Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP	Kenaikan Pangkat PNS	Nota usul persetujuan teknis BKN dan keputusan kenaikan - pangkat ke gol.I/b s.d. II/d di lingkungannya (apabila Kepala Perwakilan berhalangan tetap).

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKP

Nomor : Kep- 122 /K/SU/2011

Tanggal : 17 Februari 2011

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	KEWENANGAN MENANDATANGANI
		Kenaikan Gaji Berkala / Penyesuaian Gaji Pokok PNS	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS di lingkungannya (apabila Kepala Perwakilan berhalangan tetap).
			Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok PNS bagi PNS gol. III dan gol.IV di lingkungannya (apabila Kepala Perwakilan berhalangan tetap).
			Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok PNS bagi PNS gol. I dan gol.II di lingkungannya.
		Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu	Keputusan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana s.d. Pertama bagi PNS di lingkungannya (apabila Kepala Perwakilan berhalangan tetap).
		Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penetapan Angka Kredit pengangkatan pertama PNS ke dalam jabatan fungsional Auditor di lingkungannya (apabila Kepala Perwakilan berhalangan tetap).
			Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Auditor Pelaksana s.d. Auditor Madya gol.IV/a di lingkungannya (apabila Kepala Perwakilan berhalangan tetap).
		Mutasi Jabatan Fungsional Umum	Keputusan pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS s.d. gol.III di lingkungannya (apabila Kepala Perwakilan berhalangan tetap).

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,
KEPALA
MARDIASMO